

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban yang secara system pemungutannya sudah diatur oleh Undang-undang. Kewajiban ini diberlakukan untuk semua masyarakat tidak terkecuali hal-hal yang sudah diatur seperti kewajiban membayar pajak jika ada upaya jual beli aset. Pemungutan yang besar untuk pajak membuat pihak lain memanfaatkannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk mewakili para pihak yang menggunakan jasanya membayarkan pungutan berupa pajak kepada Negara. Permasalahan timbul ketika notaris menyalagunakan kewenangannya dan membuat tindakan pidana yang merugikan parapihak yang memberikan kuasa serta Negara yang tidak mendapatkan pajak yang seharusnya diserahkan.

Kata Kunci: Pajak, Notaris, Kewenangan, Pidana

ABSTRACT

Construction service is one of the high risk businesses because it requires large amount of capital, technical matters and non-technical matters, which are the most essential factors that affected the enforcement of the construction contract. Bank guarantee is an unseparated part of work construction contract because the service provider can encounter domino effect from it. This effect arises because of the decision of a bankruptcy statement from District Court within the enforcement period of work construction contract and it leads to cash flows problem for Contractor. This thesis will comprehensively analyze the forms of legal protection that can be given to the service providers related to the matters that gives disadvantages in the process of managing and securing the insolvent properties by the curator.

Keyword: Construction Service, Work Construction Contract, Debtor, Creditor, Bankruptcy